

**PERBANDINGAN ANALISIS KINERJA KEUANGAN PERBANKAN  
SYARIAH DAN PERBANKAN KONVENSIONAL DENGAN  
MENGUNAKAN METODE CAMEL  
(Studi Kasus Pada Laporan Keuangan Bank Bukopin, Bank Mayapada, Bank Muamalat  
Indonesia dan Bank Syariah Mandiri  
Periode Tahun 2009 – 2013)**

**TINANDRI YUAN PERTIWI  
NIM : EM.11.1.0773**

**Dosen Pembimbing :**

- 1. Maria Magdalena Minarsih,SE,MM**
- 2. Muh. Mukeri Warso,Sag, MM**

**ABSTRAK**

Analisis CAMEL memiliki lima aspek, yaitu aspek permodalan menggunakan rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*), aspek kualitas aktiva produktif menggunakan rasio KAP (Kualitas Aktiva Produktif) dan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), aspek rentabilitas menggunakan rasio ROA (*Return On Assets*) dan BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional), dan aspek likuiditas menggunakan rasio LDR (*Loan to Deposit Ratio*). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada PT. Bank Muamalat, PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank Bukopin, PT. Bank Mayapada, maka analisa Rasio CAR dinilai dari tingkat kesehatan menurut Bank Indonesia, maka semua perbankan yang menjadi obyek dalam penelitian ini dalam keadaan **Sehat**. Dilihat dari Rasio KAP 1 tingkat kesehatan ke-empat perbankan yang menjadi obyek penelitian dalam keadaan **Sehat**. Dari rasio ROA secara umum kondisi tingkat kesehatan masing-masing bank dalam keadaan **Sehat**, secara rasio BOPO, rata-rata kondisi kesehatan untuk aspek rentabilitas masing-masing bank dalam keadaan **Sehat**, serta analisis LDR menunjukkan masing-masing bank dalam kondisi **Tidak Sehat**. Hal tersebut kemungkinan disebabkan masih kurang populernya bentuk simpanan yang dimiliki oleh perbankan syariah yang tidak memberikan *feed back* dalam bentuk bunga, sehingga sebagian besar masyarakat yang masih kurang paham mengenai prinsip kerja perbankan syariah, menganggap bahwa simpanan di perbankan syariah tidak menimbulkan keuntungan.

Kata kunci : Bank Syariah, Bank Konvensional, Metode CAMEL

## ABSTRACTION

*Method CAMEL own five aspect, that is Capital (using Capital Adequacy Ratio (CAR)), Assets (using Productive Assets Quality (KAP) and Exclusion of Productive Assets Abolition (PPAP)), Earning/Rentabilitas (using Return On Assets (ROA) Ratio and BOPO Ratio), and Liquidity (using Loan to Deposit Ratio (LDR)). The research result at PT. Bank Muamalat, PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank Bukopin, PT. Bank Mayapada, explaining that the point of CAR if assessed from healthy level according to central Bank (Bank Indonesia) showing if the banking is **healthy**. Pursuant to KAP ratio the healthy level of banking is **healthy**. From analyses ROA and BOPO explaining that the healthy level of banking is **healthy**, and the result of LDR analyses showing the healthy level of banking is unhealthy /indisposed. The mention possibility because of still less be itd popular of Moslem Law Banking saving what does not give feed back in from of rate. Most of society what still less understanding about the principle work the Moslem Law Banking assuming if the saving not conducive to profit.*

**Keyword : Bank of Moslem Law, Conventional Bank, Method CAMEL**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam merupakan potensi pasar yang besar bagi pelaksanaan sistem keuangan syariah, akan tetapi pada awalnya pasar ini kurang diminati baik oleh lembaga keuangan yang ada ataupun oleh masyarakat Indonesia sendiri.

Disamping belum adanya legalitas secara resmi dari pemerintah, minimnya tingkat pemahaman masyarakat akan nilai syariah dinilai menjadi beberapa faktor terjadinya keadaan tersebut.

Akan tetapi sejak diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998 mengenai Perbankan, dimana dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa perbankan di Indonesia dikelompokkan menjadi 4 (empat), yaitu : (1) Bank Sentral; (2) Bank Umum Konvensional; (3) Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan (4) Bank Umum Syariah, serta peran aktif beberapa perbankan yang telah menggunakan sistem syariah melakukan pengenalan kepada masyarakat luas, baik melalui pemasaran secara langsung, media massa maupun melalui kegiatan sosial keagamaan, dirasakan telah berhasil memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya nilai syariah dalam menyokong segala kegiatan keuangan yang mereka lakukan, baik dalam hal pribadi maupun sebagai fasilitator dalam usaha yang dimilikinya.

Meskipun dilihat dari data statistik Bank Indonesia tahun 2008 menunjukkan dari beberapa produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah, produk murabahah (jual-beli) merupakan produk pembiayaan yang masih menjadi unggulan perbankan syariah di Indonesia, hal ini disebabkan produk murabahah dinilai paling mampu memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan perbankan syariah selama ini. Kondisi tersebut sebenarnya kurang pas dengan konsep syariah

dalam ajaran Islam, karena konsep syariah yang dianjurkan dalam Islam lebih mengedepankan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*), yakni mudharabah dan musyarakah.

Sebagaimana perbankan konvensional pada umumnya, perbankan syariah juga harus tetap melaporkan laporan keuangannya kepada Bank Indonesia yang merupakan Bank Sentral di Indonesia, oleh karena itu perbankan syariah tetap perlu melakukan dan dilakukan analisis terhadap laporan keuangannya, sehingga dapat dinilai tingkat kesehatan perbankan syariah itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 10 tahun 1998 pasal 29 yang menyatakan bahwa “Mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat padanya”.

Hanafi dan Halim (2005) juga menjelaskan analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan pada dasarnya karena ingin mengetahui tingkat profitabilitas (keuntungan) dan tingkat rasio atau kesehatan suatu perusahaan. Analisis rasio yang sering digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja perbankan syariah sama dengan alat analisis yang umumnya digunakan terhadap dalam melakukan penilaian kinerja bank konvensional yang diatur dalam SE Bank Indonesia nomor 30/UPPB/tgl 19/03/1998 yaitu analisis CAMEL, yang terdiri dari *Capital, Assets Quality, Management Risk, Earning*, dan *Liquidity*.

Perkembangan perbankan syariah 5 tahun terakhir sangat pesat, tidak hanya dari segi kualitas pelayanan, akan tetapi kuantitas bank, baik pendirian bank syariah baru ataupun pendirian kantor cabang memberikan indikasi bahwa pasar potensial yang ada di masyarakat Indonesia, mulai dikerjakan dengan serius oleh lembaga-lembaga keuangan di Indonesia.

Akan tetapi di sisi lain, perkembangan tersebut juga memunculkan tingkat persaingan yang semakin ketat, baik antar perbankan syariah ataupun persaingan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional yang telah ada sebelumnya.

Dengan adanya persaingan tersebut, maka analisis terhadap kinerja perbankan syariah menjadi semakin penting, agar segala kegiatan operasional perbankan syariah tetap memperhatikan asas kehati-hatian namun tetap mengedepankan perolehan profit yang besar.

Dalam penelitian ini, Bank Umum Syariah yang dipilih merupakan perbankan syariah yang telah berdiri lebih dari lima tahun, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Syariah Mandiri (BSM).

Sedangkan bank umum konvensional yang digunakan dalam penelitian ini adalah perbankan konvensional yang memiliki *total assets* sebanding dengan kedua bank syariah tersebut. Informasi yang digunakan untuk menganalisa kinerja keuangan perbankan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan masing-masing bank yang diteliti dari tahun 2009 – 2013.

## B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejauh mana kinerja keuangan perbankan syariah apabila dibandingkan dengan kinerja keuangan perbankan konvensional menggunakan metode CAMEL.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan perbankan syariah dibandingkan dengan kinerja perbankan konvensional menggunakan metode CAMEL.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### C. Bank

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, pada Bab I, Pasal 1 (ayat 2) dijelaskan bahwa bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Menurut PSAK No.31 tentang Akuntansi Perbankan, Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (*deficit unit*), serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.

Menurut Kashmir (2002) mendefinisikan bank sebagai “lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya”.

Hasibuan (2009) menjelaskan bahwa “Bank umum adalah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul dana dan penyalur kredit, pelaksana lalu lintas pembayaran, stabilisator moneter, serta dinamisator pertumbuhan perekonomian.”

Triandaru dan Santoso (2006), mengemukakan bahwa bank memiliki beberapa fungsi, diantaranya:

1. Bank sebagai *Agent of Trust* (Lembaga Kepercayaan)  
Dalam hal ini bank berperan sebagai badan usaha untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana (*financial intermediary*). Dari kedua peranan tersebut, maka bank memerlukan kepercayaan yang besar dari masyarakat,

yang akan menyimpan dananya serta penyaluran atas dana tersebut.

2. Bank sebagai *Agent of Development*  
Mengacu pada pengertian bank dalam UU No. 10 tahun 1998, dimana bank memiliki tugas untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, sehingga dalam hal ini bank dituntut untuk dapat menyalurkan pinjaman dan atau bentuk lainnya tepat sasaran sehingga ikut membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat.
3. Bank sebagai *Agent of Services*  
Dalam hal ini bank berperan sebagai fasilitator untuk mempermudah segala bentuk kegiatan atau transaksi ekonomi yang dibutuhkan masyarakat. Fasilitas yang diberikan berupa jasa transfer uang, inkaso, *letter of credit*, dan lain sebagainya.

Di dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 juga dijelaskan bahwa perbankan di Indonesia dikelompokkan menjadi 4 (empat), yaitu:

1. Bank Sentral  
Bank sentral adalah sebuah badan keuangan milik negara yang diberikan tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan lembaga-lembaga keuangan dan menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut akan menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang stabil.
2. Bank Umum Konvensional  
Dijelaskan dalam UU No. 10 tahun 1998 bahwa pengertian bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran; atau bank komersial (*commercial bank full service bank*).  
Sehingga yang dimaksud bank umum konvensional adalah sebagaimana pengertian tersebut dengan

menghilangkan kalimat “dan atau berdasarkan prinsip syariah”.

3. Bank Perkreditan Rakyat  
Dijelaskan pula dalam UU No. 10 tahun 1998 bahwa pengertian bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (*ruralbank*).
4. Bank Umum Syariah  
Mengacu pada pengertian bank umum dalam UU No. 10 tahun 1998, bahwa bank umum syariah merupakan bank yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

#### **D. Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah**

Pengertian bank umum konvensional telah dijelaskan dalam pengertian bank umum dalam UU No. 10 tahun 1998, dengan menghilangkan kalimat “dan atau berdasarkan prinsip syariah”, maka bank umum konvensional dapat diartikan sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sedangkan bank umum syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan berdasarkan pada prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Kehadiran dan keberadaan bank umum syariah, merupakan akibat dari ketidaknyamanan sebagian masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam dengan konsep bunga yang dihadirkan oleh bank umum konvensional.

Hal tersebut dikarenakan di dalam konsep Islam sangat menolak (mengharamkan) adanya bunga (riba).

Meskipun konsep syariah yang dihadirkan masih terbatas pada penggunaan Al-Qur'an dan Hadist sebagai landasan atas kegiatan operasional dan produk yang dihasilkan, dan belum mencapai tahapan penggunaan prinsip syariah Islam dan tata cara yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist secara sempurna.

Keberadaan bank umum syariah dinilai telah menjadi solusi terbaik untuk mengatasi kekhawatiran yang ada di dalam sebagian masyarakat. Sebagai bank yang melandaskan kegiatan operasional dan produk yang dihasilkannya pada syariah Islam, maka ada beberapa prinsip syariah yang tetap harus ditaati oleh bank umum syariah, antara lain (Antonio, 2001):

1. Prinsip Titipan atau Simpanan (*Al-Wadiah*) *Al-Wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki (Syafi'i Antonio, 2001).
2. Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*)  
Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah:
  - a. *Al-Mudharabah*
  - b. *Al-Musyarakah*
3. Prinsip Jual Beli (*Al-Tijarah*)  
Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*).
4. Prinsip Sewa (*Al-Ijarah*)  
*Al-ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui

pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. *Al-ijarah* terbagi kepada dua jenis: (1) *Ijarah*, sewa murni. (2) *ijarah al muntahiya bit tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa.

#### 5. Prinsip Jasa (*Fee-Based Service*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank.

Antonio (2002) menjelaskan bahwa Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional memiliki perbedaan yang signifikan.

### E. Laporan Keuangan

Ikatan Akuntansi Indonesia (2007) mendefinisikan laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan yang biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.”

Menurut Munawir (2007) menjelaskan “Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau efektivitas perusahaan tersebut.”

Harahap (2009) mendefinisikan bahwa “Laporan Keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.

Adapun jenis laporan keuangan yang lazim dikenal adalah : Neraca atau Laporan Laba/Rugi, atau hasil usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Posisi Keuangan.”

Baridwan (2004) mengartikan bahwa “Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selamatahun buku yang bersangkutan.”

Ikatan Akuntansi Indonesia menjelaskan bahwa pembuatan laporan keuangan mempunyai beberapa tujuan, antara lain:

1. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan-pengambilan keputusan ekonomi.
2. Laporan keuangan disusun untuk memenuhi kebutuhan bersama oleh sebagian besar pemakainya, yang secara umum menggambarkan pengaruh dari kejadian masa lalu.
3. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang dilakukan manajemen atau pertanggung jawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan terhadap manajemen.

Tujuan disusunnya laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan tersebut adalah:

1. Pemilik perusahaan / *Shareholder* (para pemegang saham)
2. Manajemen Perusahaan
3. Investor
4. Kreditor
5. Pemasok dan kreditor lainnya
6. Pelanggan
7. Pemerintah dan Regulator

8. Karyawan
9. Analis, Akademis, Pusat Data Bisnis
10. Masyarakat

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No.1 (2004:2), Laporan Keuangan yang lengkap terdiri atas komponen-komponen berikut ini:

1. Neraca
2. Laporan Laba-Rugi
3. Laporan Arus Kas
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan atas Laporan keuangan

Munawir (1997) dalam Geo dan Azhari (2009) menerangkan bahwa laporan keuangan juga memiliki keterbatasan. Adapun keterbatasan-keterbatasan tersebut adalah:

1. Laporan keuangan yang dibuat secara periodik pada dasarnya merupakan intern report atau laporan yang dibuat antara waktu tertentu yang sifatnya sementara dan bukan merupakan laporan yang final.
2. Laporan keuangan menunjukkan angka dalam rupiah yang kelihatannya bersifat pasti dan tepat, akan tetapi sebenarnya dasar penyusunannya dengan standar nilai yang mungkin berbeda-beda atau berubah-ubah.
3. Laporan keuangan disusun berdasarkan hasil pencatatan transaksi keuangan atau nilai rupiah dari beberapa waktu dan tanggal yang lalu, dimana daya beli uang tersebut semakin menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
4. Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi posisi atau keadaan keuangan perusahaan karena faktor-faktor tersebut tidak dapat dinyatakan dengan suatu uang.

## F. Analisis Laporan Keuangan

Soemarsono (1996) dalam Geo dan Azhari (2009) menerangkan laporan keuangan yang telah disusun perlu dianalisis. Soemarsono memberikan definisi bahwa analisis laporan keuangan pada hakekatnya adalah menghubungkan angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan dengan angka lain atau menjelaskan perubahan-perubahannya.

Munawir (1997) dalam Geo dan Azhari (2009) menerangkan teknik analisis yang sering digunakan, antara lain:

1. Analisa perbandingan laporan keuangan.
2. *Trend Percentage Analysis* atau analisis index.
3. Analisis *Common Size*.
4. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja.
5. Analisis sumber dan penggunaan kas.
6. Analisis rasio.
7. Analisis perubahan laba kotor.
8. Analisis break even.

Dari beberapa teknik analisis tersebut Rangkuti (1997) dalam Geo dan Azhari (2009) menerangkan bahwa analisis rasio keuangan merupakan teknik analisis yang sering digunakan dalam menganalisa laporan keuangan, hal tersebut dikarenakan teknik analisis rasio merupakan teknik yang dapat digunakan secara cepat untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan.

## G. Analisis Tingkat Kesehatan Bank

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 13 tahun 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi Bank yang dilakukan terhadap resiko dan kinerja bank. Hasil akhir penilaian kesehatan bank dituangkan dalam bentuk peringkat yang disebut dengan Peringkat Komposit. PBI No. 13 tahun 2011 BAB I Pasal 2 (ayat 1) juga menjelaskan bank wajib memelihara dan/atau

meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha.

Di dalam BAB III PBI No. 13 tahun 2011 diuraikan mengenai faktor-faktor yang termasuk dalam cakupan penilaian tingkat kesehatan bank, yaitu:

### 1. Profil Resiko (*Risk Profile*)

Penilaian ini merupakan penilaian terhadap resiko intern dan kualitas penerapan manajemen resiko dalam operasional bank yang dilakukan terhadap 8 resiko, yakni: Resiko Kredit, Resiko Pasar, Resiko Likuiditas, Resiko Operasional, Resiko Hukum, Resiko Strategik, Resiko Kepatuhan, Resiko Reputasi.

### 2. *Good Corporate Governance* (GCG)

Penilaian ini merupakan penilaian manajemen bank atas penerapan dan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

### 3. Rentabilitas (*Earning*)

Penilaian ini meliputi penilaian terhadap kinerja *earnings*, sumber-sumber *earnings* dan *sustainability earnings* bank.

### 4. Permodalan (*Capital*)

Penilaian ini meliputi penilaian terhadap nilai kecukupan modal dan pengelolaan permodalan.

## III. SEJARAH BERDIRINYA PERUSAHAAN

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Meskipun sebagian besar penduduknya menganut agama Islam, akan tetapi hingga awal tahun 1990-an belum ada lembaga keuangan yang menggunakan sistem ekonomi Islam (syariah) dalam kegiatan operasionalnya.

Hal tersebut kemudian mendasari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam acara Lokakarya Musyawarah Nasional (Munas) ke-IV pada bulan Agustus 1990 di Jakarta

membentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam pertama di Indonesia.

Tim Perbankan Majelis Ulama Indonesia (MUI) bekerjasama dengan pemerintah Indonesia, serta dengan mendapat dukungan dari anggota Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim, berhasil mendirikan bank syariah pertama di Indonesia yakni PT. Bank Muamalat Tbk yang dilakukan penandatanganan Akta Pendiriannya pada tahun 1991. Pada awal penandatanganan Akta Pendiriannya, saham perseroan berhasil terjual senilai Rp 84 Miliar, serta mendapatkan tambahan modal senilai Rp 106 Milliar dari masyarakat Jawa Barat pada saat acara sillaturahmi pendiriannya di Istana Bogor. Pada tahun 1994, PT. Bank Muamalat Tbk juga berhasil menyandang predikat sebagai bank devisa (saosabcd.blogspot.com).

Krisis ekonomi yang dialami Indonesia sebagaimana negara-negara lain dikawasan Asia Tenggara pada akhir periode tahun 1990-an, menyebabkan sektor perbankan nasional terkendala kredit macet. PT Bank Muamalat Tbk mencatat pada tahun 1998 rasio pembayaran yang mengalami kemacetan (NPF) sebesar 60% dengan kerugian perseroan sebesar Rp 105 Milliar. Untuk menyelamatkan perseroan, manajemen PT. Bank Muamalat Tbk mengundang investor asing yang potensial dan bersedia berinvestasi terhadap saham perseroan, pada tahun 1999, *Islamic Development Bank* (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi secara resmi menjadi salah satu pemegang saham PT. Bank Muamalat Indonesia.

Dampak krisis ekonomi yang terjadi pada sektor perbankan nasional di akhir tahun 1990-an juga memberikan pencerahan bagi perbankan syariah di Indonesia, karena pada mulanya undang-undang perbankan yang berlaku di Indonesia yaitu UU No. 7 Tahun 1992, belum memberikan naungan dan

mengatur secara konkret mengenai keberadaan serta kegiatan operasional perbankan syariah. Akan tetapi pasca krisis moneter, pemerintah Indonesia melalui Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 memperinci pembahasan serta aturan mengenai perbankan syariah, serta memberikan arahan bagi perbankan konvensional untuk membentuk cabang syariah atau mengkonversikan diri secara utuh menjadi bank syariah.

Krisis ekonomi yang terjadi serta perubahan perundangan perbankan di Indonesia pada akhir tahun 1990-an juga melahirkan perbankan syariah swasta pertama, yakni Bank Syariah Mandiri (BSM). Bank Syariah Mandiri merupakan konversi dari PT. Bank Susila Bakti yang sebelumnya merupakan bank yang melakukan kegiatan operasionalnya secara konvensional.

PT. Bank Susila Bakti adalah sebuah lembaga keuangan yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara Meskipun dan PT. Mahkota Prestasi. Penggabungan empat perbankan yang mengalami krisis oleh pemerintah yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo menjadi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk pada tahun 1999, sekaligus juga menempatkan dan menetapkan PT. Bank Mandiri Tbk sebagai pemegang saham mayoritas dari PT. Bank Susila Bakti ([www.syariahamandiri.co.id](http://www.syariahamandiri.co.id)).

Sebagai respon terhadap pemberlakuan UU No. 10 tahun 1998, dimana bank umum diberikan peluang oleh pemerintah untuk dapat melayani secara konvensional maupun syariah (*dual system banking*), maka PT. Bank Mandiri Tbk membentuk tim untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan yang dimilikinya. Tim Pengembangan Perbankan Syariah tersebut memandang bahwa pemberlakuan UU No. 10 tahun 1998 tersebut sebagai momentum yang

tepat untuk mengkonversikan PT. Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri.

Perubahan nama dan kegiatan operasional PT. Bank Susila Bakti (bank konvensional) menjadi Bank Syariah Mandiri (bank dengan prinsip syariah) tercantum dalam Akta Notaris : Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1998, yang kemudian dikukuhkan melalui SK Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP.BI/1999 pada tanggal 25 Oktober 1999. Sedangkan perubahan nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri disetujui oleh BI melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999(www.syariahamandiri.co.id).

PT. Bank Bukopin didirikan kali pertama pada tanggal 10 Juli 1970 dengan nama Bank Umum Koperasi Indonesia. Pada tahun 1989, Bank Umum Koperasi Indonesia berganti nama menjadi Bank Bukopin, serta pada tahun 1993, status perusahaan meningkat menjadi perseroan terbatas.

Sejak awal berdiri, PT. Bank Bukopin memfokuskan kinerjanya pada segmen UMKMK, akan tetapi dengan adanya kesempatan yang terbuka, serta upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang lebih luas, maka kegiatan operasional PT. Bank Bukopin mengembangkan usahanya ke segmen komersial dan konsumen.

Ketiga segmen tersebut yang kemudian menjadi pilar utama bisnis PT. Bank Bukopin hingga dapat tumbuh dan berkembang menjadi kelompok bank menengah di Indonesia dari segi aset hingga sekarang ini.

PT. Bank Mayapada Internasional kali pertama berdiri pada tanggal 7 September 1989 melalui akta notaris No. 196 Misaharda Wilamarta, SH dan baru resmi beroperasi secara komersial pada tanggal 23 Maret 1990, setelah mendapatkan izin operasi oleh menteri

keuangan melalui Kep Men No. 342/KMK.013/1990 tertanggal 16 Maret 1990.

Pada tahun 1993, PT. Bank Mayapada Internasional mendapatkan izin dari Bank Indonesia untuk menjadi bank devisa melalui SK BI No. 26/26/KEP/DIR tertanggal 3 Juni 1993. Pasca krisis ekonomi pada tahun 1997, PT. Bank Mayapada Internasional membuka diri untuk menjadi bank publik, hal tersebut dilakukan guna melepaskan diri dari krisis yang terjadi, sehingga perseroan bisa mendapatkan bantuan likuiditas yang berasal dari investasi yang masuk.

#### IV. PEMBAHASAN

Dari hasil analisis yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya, maka dapat dilakukan pembahasan terhadap hasil tersebut sebagai berikut:

##### 1. Capital (Permodalan)

a. Berdasarkan hasil perhitungan Rasio CAR

##### Hasil Perhitungan Nilai Rasio CAR

Bank	Rasio CAR (%)				
	2009	2010	2011	2012	2013
Bank Muamalat (BMI)	11,10	13,26	11,97	11,57	12,41
Bank Syariah Mandiri (BSM)	15,72	12,40	12,71	13,82	14,10
Bank Bukopin	14,36	12,06	12,71	16,34	15,12
Bank Mayapada	19,37	22,61	16,14	12,07	15,39

Sumber : Olahan Data 2014

Secara umum hasil yang ditunjukkan oleh perolehan rasio CAR pada tabel di atas, menjelaskan bahwa kinerja keuangan perbankan yang menjadi obyek penelitian masih kurang baik, meskipun secara nominal hasil yang diperoleh perbankan syariah lebih kecil apabila dibandingkan dengan hasil perolehan dari perbankan konvensional.

b. Berdasarkan Tingkat Kesehatan menurut Bank Indonesia

Bank Indonesia melalui SK DIR Bank Indonesia Nomor: 30/21/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang tata cara penilaian tingkat kesehatan bank, menetapkan kriteria tingkat kesehatan perbankan dilihat dari aspek CAR adalah sebagai berikut:

Kriteria Tingkat Kesehatan Rasio CAR Menurut Bank Indonesia

Kriteria BI	Prosentase
Sehat	> 8 %
Cukup sehat	7,9 % - 8 %
Kurang sehat	6,5 % - 7,9 %
Tidak sehat	< 6,5 %

Sumber: SK DIR BI No: 30/21/KEP/DIR tanggal 30 April 1997

Berdasarkan Surat Keterangan Direktur Bank Indonesia tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa perolehan nilai rasio CAR masing-masing bank menunjukkan bahwa perseroan dalam keadaan sehat.

Meskipun hal tersebut terbalik dengan keadaan kinerja perusahaan apabila dinilai dari perhitungan hasil rasio CAR, dimana secara umum kondisi kinerja perusahaan dalam keadaan kurang baik, karena diharuskan menanggung nilai ATMR yang cukup tinggi.

## 2. Kualitas Aset

a. Berdasarkan hasil perhitungan rasio KAP 1 Hasil Perhitungan Nilai Rasio KAP 1

Bank	Rasio KAP 1 (%)				
	2009	2010	2011	2012	2013
Bank Muamalat (BMI)	4,29	3,56	2,31	1,61	1,07
Bank Syariah Mandiri (BSM)	0,96	0,98	0,98	0,97	0,96
Bank Bukopin	2,58	2,95	2,69	2,71	1,79
Bank Mayapada	3,62	4,15	1,99	2,50	0,87

Sumber : Olahan Data 2014

Dari hasil perhitungan rasio KAP 1 sebagaimana yang telah disajikan dalam tabel di atas, dapat dijelaskan seperti berikut:

(1) Rasio KAP 1 PT. Bank Muamalat Indonesia

Hasil di atas menunjukkan bahwa tingkat kinerja keuangan PT. Bank Muamalat dalam

keadaan yang baik, karena hampir keseluruhan nilai aktiva produktif yang bermasalah dapat dipenuhi oleh total aktiva produktif yang dimiliki oleh perusahaan, meskipun secara nominal dari tahun ke tahun terjadi tren negatif, dimana terjadi penurunan nilai rasio tiap tahunnya.

(2) Rasio KAP 1 PT. Bank Syariah Mandiri

Hasil tersebut diatas menunjukkan bahwa kinerja keuangan perseroan masih kurang baik, dimana setiap 1 nilai aktiva produktif yang bermasalah tidak dapat dipenuhi oleh total produktif yang dimiliki perusahaan. Akan tetapi pergerakan yang stagnan yang terjadi tiap tahunnya, memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam melakukan evaluasi kinerja keuangannya.

(3) Rasio KAP 1 PT. Bank Bukopin

Perolehan nilai rasio tersebut diatas menunjukkan keadaan yang positif pada kinerja perusahaan, dimana setiap aktiva produktif yang bermasalah dapat dipenuhi oleh keseluruhan dari total aktiva produktif yang ada, sehingga tidak mengganggu pos-pos likuid yang lain.

(4) Rasio KAP 1 PT. Bank Mayapada

Penurunan nilai rasio dibawah angka 1% pada tahun 2013 perlu menjadi perhatian yang lebih bagi manajemen perseroan, mengingat di tahun-tahun sebelumnya keadaan aktiva produktif yang bermasalah dinilai aman, karena telah dipenuhi keseluruhannya oleh total aktiva produktif yang dimiliki. Keadaan tersebut harus segera diperbaiki agar potensi masalah yang ditimbulkan oleh aktiva-aktiva produktif yang telah diklasifikasikan tersebut tidak semakin membesar.

b. Berdasarkan tingkat kesehatan menurut Bank Indonesia.

SK DIR Bank Indonesia Nomor: 30/21/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang tata cara penilaian tingkat kesehatan bank, menjelaskan bahwa perhitungan tingkat kesehatan untuk aspek kualitas aset produktif

perusahaan didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

**Kriteria Tingkat Kesehatan Rasio  
KAP1  
Menurut Bank Indonesia**

Kriteria BI	Prosentase
Sehat	< 10,35%
Cukup sehat	10,35% - 12,60%
Kurang sehat	12,60% - 14,85%
Tidak sehat	> 14,85%

Sumber : SK DIR BI No: 30/21/KEP/DIR tanggal 30 April 1997

Tabel Perolehan nilai KAP di atas apabila disesuaikan dengan kriteria dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kesehatan ke-empat perbankan yang menjadi obyek penelitian dalam keadaan Sehat. Hasil tersebut memperkuat bahwa kemampuan dari masing-masing perusahaan cukup baik dalam menjaga dan mengelola aktiva produktif yang bermasalah, meskipun untuk PT. Bank Syariah Mandiri secara nominal rasio masih perlu perbaikan yang lebih baik lagi.

### 3. *Earning (Rentabilitas)*

a. Berdasarkan hasil perhitungan rasio ROA dan BOPO

(1) Rasio ROA

**Tabel 4.7  
Hasil Perhitungan Rasio  
ROA**

Bank	Rasio ROA (%)				
	2009	2010	2011	2012	2013
Bank Muamalat (BMI)	0,40	1,08	1,14	1,16	1,57
Bank Syariah Mandiri (BSM)	1,97	1,80	1,58	2,08	1,42
Bank Bukopin	1,40	1,40	1,64	1,61	1,72
Bank Mayapada	0,78	1,05	1,78	2,05	2,12

Sumber : Olahan Data 2014

Hasil perhitungan rasio ROA sebagaimana disajikan dalam tabel di atas, dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

(a) Rasio ROA PT. Bank Muamalat

Meskipun nilai laba yang dihasilkan masih kecil, akan tetapi apabila dilihat dari pergerakan dari tahun ke tahun, menunjukkan

bahwa kenaikan jumlah aktiva yang dimiliki oleh perseroan tiap tahunnya berbanding lurus (positif) dengan laba yang dihasilkan oleh perseroan. Keadaan diatas menunjukkan bahwa perusahaan masih harus lebih optimal dalam upaya menghasilkan keuntungan perusahaan.

(b) Rasio ROA PT. Bank Syariah Mandiri

Tren penurunan nilai laba yang kerap kali terjadi pada periode penelitian, menunjukkan masih lemahnya aktivitas ekonomi perseroan dalam memanfaatkan aktiva yang dimiliki. Hal ini perlu menjadikan perhatian oleh segala aspek perusahaan, mengingat peningkatan pada tahun 2012 yang menembus angka diatas 2% menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu mengelola dan manajemen aktivitas ekonominya dengan lebih baik.

(c) Rasio ROA PT. Bank Bukopin

Perolehan nilai tersebut diatas, dapat dikategorikan sangat kecil mengingat total aset/aktiva yang dimiliki perusahaan termasuk dalam kategori medium (menengah). Perkembangan kenaikan laba dari tahun ke tahun juga lambat, sehingga perusahaan perlu lebih optimal lagi dalam mengembangkan dan menggunakan aktiva yang dimiliki dalam setiap aktivitas ekonomi yang dilakukannya.

(d) Rasio ROA PT. Bank Mayapada

Meskipun secara nominal prosentase yang ditunjukkan relative kecil, akan tetapi apabila dilihat dari nilai aktiva yang dimiliki oleh perseroan (dibandingkan dengan aktiva bank (obyek penelitian) lainnya), nilai perolehan laba kotor PT. Bank Mayapada dapat dikatakan cukup baik, hal tersebut diperkuat dengan tren positif pada perkembangan laba kotor dari tahun ke tahunnya.

(2) Rasio BOPO

**Tabel 4.10**  
**Hasil Perhitungan Rasio BOPO**

Bank	Rasio BOPO (%)				
	2009	2010	2011	2012	2013
Bank Muamalat (BMI)	42,28	41,78	37,64	36,92	36,02
Bank Syariah Mandiri (BSM)	45,09	47,78	47,63	47,92	55,08
Bank Bukopin	82,98	81,19	78,34	71,33	81,48
Bank Mayapada	129,39	124,76	81,05	80,19	78,58

Sumber : Olahan Data 2014

Hasil analisis rasio BOPO disajikan dalam tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa secara umum perolehan nilai rasio ROA dan BOPO menunjukkan manajemen masing-masing bank masih kurang optimal dan tidak efisiensi dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, sehingga nilai laba atau keuntungan yang diperoleh dinilai masih kecil. Meskipun secara rasio BOPO, PT. Bank Muamalat Indoensia dapat melaksanakan efisiensi lebih baik dari ketiga bank yang lain.

b. Berdasarkan Tingkat Kesehatan menurut Bank Indonesia

Sebagaimana diatur dalam SK DIR BI No. 30/21/KEP/DIR tanggal 30 April 1997, bahwa kriteria tingkat kesehatan perbankan dinilai dari rasio rentabilitasnya (menggunakan rasio ROA dan BOPO) adalah sebagai berikut:

**Kriteria Tingkat Kesehatan Rasio ROA dan BOPO Menurut Bank Indonesia**

Kriteria BI	ROA	BOPO
Sehat	> 1,22%	< 93,52%
Cukup sehat	0,99% - 1,21%	93,52% - 94,73%
Kurang sehat	0,77% - 0,98%	94,73% - 95,92%
Tidak sehat	< 0,76%	> 95,92%

Sumber: SK DIR BI No: 30/21/KEP/DIR tanggal 30 April 1997

Apabila disesuaikan dengan kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia tersebut diatas, maka perolehan nilai ROA menunjukkan bahwa aspek rentabilitas masing-masing bank termasuk di dalam kategori Sehat, meskipun pada periode 2009 terdapat dua bank yaitu PT. Bank Muamalat

dan PT. Bank mayapada berada dalam keadaan tidak dan kurang sehat.

Perolehan nilai rasio BOPO, menerangkan bahwa rata-rata kondisi aspek rentabilitas untuk masing-masing bank dalam keadaan Sehat. Meskipun untuk PT. Bank Mayapada pada periode tahun 2009-2010 mengalami kondisi tidak sehat, akan tetapi efisiensi yang dilakukan oleh manajemen perusahaan pada tahun 2011 terbukti mampu merubah dan memperbaiki kondisi tersebut.

Secara global tingkat rentabilitas masing-masing bank dalam penelitian ini dalam keadaan baik, meskipun perolehan nilai laba serta tingkat efisiensi pada kegiatan operasional perusahaan masih kecil dan lemah.

Akan tetapi kondisi kesehatan masing-masing bank menunjukkan bahwa manajemen masing-masing perusahaan senantiasa melakukan tindakan preferatif maupun atraktif guna mempertahankan kelangsungan perusahaan, serta meningkatkan tingkat profitabilitas perusahaan.

**4. Likuiditas**

a. Berdasarkan perolehan nilai rasio LDR

**Tabel 4.13**  
**Hasil Perhitungan Rasio LDR**

Bank	Rasio LDR(%)				
	2009	2010	2011	2012	2013
Bank Muamalat (BMI)	496,90	339,14	335,94	257,08	357,11
Bank Syariah Mandiri (BSM)	273,32	254,65	317,72	222,09	178,90
Bank Bukopin	52,37	55,54	166,29	165,29	91,04
Bank Mayapada	82,14	76,08	80,33	80,79	85,61

Sumber : Olahan Data 2014

Sebagaimana disajikan pada tabel di atas, mengisyaratkan bahwa :

(1) Rasio LDR PT. Bank Muamalat Indonesia

Perolehan hasil diatas menunjukkan kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan sangat memprihatinkan, hal tersebut dikarenakan kredit yang dicairkan oleh perusahaan telah hanya seperlima yang

tercover oleh perolehan dana dari pihak ketiga (*saving*).

(2) Rasio LDR PT. Bank Syariah Mandiri

Perbandingan yang signifikan antara kredit yang disalurkan dengan dana dari pihak ketiga yang diperoleh, sebagaimana diuraikan diatas menunjukkan bahwa perusahaan perlu segera dilakukan perbaikan, mengingat bahwa prinsip kepercayaan nasabah merupakan modal utama yang diperlukan dalam menjalankan aktivitas yang berprinsip syariah.

(3) Rasio LDR PT. Bank Bukopin

Kondisi keuangan perusahaan pada tahun 2009-2010 dinilai baik, karena dari 100 nilai dana dari pihak ketiga yang diperoleh mampu digunakan untuk *memback-up* keseluruhan dari nilai kredit yang telah dikeluarkan. Akan tetapi pada tahun 2011-2013, terjadi penurunan yang signifikan, dimana nilai kredit yang disalurkan tidak dapat ditanggung sepenuhnya oleh perolehan dana dari pihak ketiga. Akan tetapi progress positif pada tahun 2013 dapat dijadikan acuan dalam mengelola dan mempertahankan perolehan dana dari pihak ketiga untuk tahun-tahun berikutnya.

(4) Rasio LDR PT. Bank Mayapada

Nilai pada tabel di atas menunjukkan tingkat keuangan PT. Bank Mayapada dalam keadaan positif, dimana dari tahun ke tahun nilai kredit yang diberikan mampu di-cover oleh dana yang diperoleh dari pihak ketiga.

b. Berdasarkan Tingkat Kesehatan menurut Bank Indonesia

Bank Indonesia sebagaimana diuraikan dalam SK DIR BI No: 30/21/KEP/DIR tanggal 30 April 1997, telah menetapkan criteria tingkat kesehatan untuk aspek likuiditas (berdasarkan rasio LDR) adalah sebagai berikut:

**Kriteria Tingkat Kesehatan Rasio LDR Menurut Bank Indonesia**

Kriteria BI	Presentase
Sehat	< 94,755%
Cukup sehat	94,755% - 98,75%
Kurang sehat	98,75% - 102,25%
Tidak sehat	> 102,25%

Sumber : SK DIR BI No: 30/21/KEP/DIR tanggal 30 April 1997

Hasil perhitungan tingkat kesehatan masing-masing bank menurut kriteria BI tersebut menunjukkan kondisi yang tidak baik dalam kinerja perbankan syariah, dari tahun ke tahun yang diteliti, likuiditas kedua perbankan syariah tersebut dalam keadaan yang Tidak Sehat. Hal tersebut kemungkinan disebabkan masih kurang populernya bentuk simpanan yang dimiliki oleh perbankan syariah yang tidak memberikan *feed back* dalam bentuk bunga, sehingga sebagian besar masyarakat yang masih kurang paham mengenai prinsip kerja perbankan syariah, menganggap bahwa simpanan di perbankan syariah tidak menimbulkan keuntungan.

Sedangkan di sisi lain, masyarakat yang awam mengenai proses kerja perbankan syariah, sangat tertarik dengan sistem pembiayaan dan pinjaman di perbankan syariah yang tidak menggunakan perhitungan bunga, melainkan dengan system bagi hasil. Oleh sebab itu, permintaan masyarakat akan pinjaman dan pembiayaan dari perbankan syariah begitu besar.

## V. KESIMPULAN

Dari hasil analisis dan pembahasan mengenai penggunaan rasio CAMEL guna membandingkan kinerja perbankan syariah dan perbankan konvensional seperti yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya (Bab IV), maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

### 1. *Capital* (Permodalan)

Hasil perhitungan terhadap rasio CAR menunjukkan bahwa rata-rata nilai rasio CAR perbankan syariah lebih kecil apabila dibandingkan dengan nilai rata-rata rasio CAR perbankan konvensional. Hal ini berarti bahwa kondisi kinerja perbankan syariah sedikit lebih baik daripada perbankan konvensional, karena nilai Aktiva Tertimbang Menurut Resiko yang harus diselesaikan oleh Modal pada perbankan syariah lebih kecil daripada perbankan konvensional. Sedangkan apabila dilihat dari tingkat kesehatannya, maka semua bank yang dijadikan obyek penelitian dalam keadaan Sehat.

### 2. *Asset Quality* (Kualitas Aset)

Nilai Rasio KAP 1 menunjukkan bahwa perbankan konvensional dalam keadaan lebih unggul daripada perbankan syariah, dimana total aktiva produktif yang dimiliki oleh perbankan konvensional mampu menutupi nilai aktiva produktif yang sedang bermasalah, sehingga tidak mengganggu pos-pos aktiva yang lain. Dievaluasi dari tingkat kesehatan menurut standar Bank Indonesia, maka semua bank dalam penelitian ini dalam keadaan Sehat.

### 3. *Earning* (Rentabilitas)

Dari segi kemampuan dalam mengkonversikan total aktiva menjadi keuntungan, maka kemampuan perbankan konvensional dalam menghasilkan laba dinilai lebih baik daripada perbankan syariah, hal tersebut didasarkan pada nilai rata-rata rasio ROA yang menunjukkan rata-rata Rasio ROA

perbankan konvensional lebih tinggi daripada perbankan syariah.

Apabila dilihat dari efisiensi pengeluaran yang dilakukan dalam kegiatan operasionalnya sebagaimana ditunjukkan oleh hasil perhitungan rasio BOPO, maka perbankan syariah dinilai lebih efisien dan efektif dalam menggunakan dan mengelola pendapatan operasional yang diperoleh untuk membiayai semua kegiatan operasional perusahaan.

Sedangkan hasil analisis terhadap tingkat kesehatan pada aspek rentabilitasnya, maka perbankan syariah dapat dikatakan lebih baik, daripada perbankan konvensional, meskipun dari hasil rasio ROA PT. Bank Muamalat lebih banyak berada dalam keadaan cukup sehat.

### 4. *Liquidity* (Likuiditas)

Tingkat likuiditas yang dianalisis dengan menggunakan rasio LDR menunjukkan bahwa perbankan konvensional lebih aman daripada kondisi keuangan perbankan syariah, dimana dana yang diperoleh dari pihak ketiga mampu menutup keseluruhan dari nilai kredit yang dikururkan oleh perusahaan. Sedangkan dilihat dari tingkat kesehatan yang dihitung berdasarkan kriteria Bank Indonesia, maka perbankan syariah dalam keadaan yang cukup mengkhawatirkan, dimana dari periode waktu yang diteliti, perbankan syariah yang diteliti dalam keadaan tidak sehat.

Dari penjelasan setiap aspek rasio CAMEL diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perbankan konvensional masih lebih unggul daripada perbankan syariah, hal tersebut kemungkinan disebabkan beberapa hal, diantaranya:

1. Target pasar perbankan konvensional lebih umum dan lebih luas daripada perbankan syariah yang terbatas pada masyarakat muslim yang menginginkan kegiatan ekonominya terbebas dari unsur riba.
2. *Feed back* atau bentuk balas jasa, seperti: hadiah, *refund*, dan lain sebagainya, yang

diberikan oleh perbankan konvensional lebih fleksibel daripada perbankan konvensional yang lebih terfokus kepada hal-hal yang bersifat kerohanian.

3. Kepahaman sebgaiian besar masyarakat muslim mengenai pentingnya menggunakan prinsip syariah dalam semua kegiatan ekonomi masih sangat rendah, sehingga keberadaan perbankan syariah masih seringkali dipandang sebelah mata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abustan. 2009. *Analisa Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional*. Fak. Ekonomi, Univ. Gunadarma.
- Ardiyana, Marissa dan Muid, Dul, S.E, M.Si, Akt. 2012. *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syari'ah Dan Bank Konvensional Sebelum, Selama, Dan Sesudah Krisis Global Tahun 2008 Dengan Menggunakan Metode Camel*.
- Antonio, Moh. Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktek*. Gema Insani Press. Jakarta.
- Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang *Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum*. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/20/PBI/2011 tanggal 30 September 2011 tentang *Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri*. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. SK DIR BI Nomor 30/21/KEP/DIR tanggal 30 April 1997. *perihal Tatacara Penilaian Kesehatan Bank Umum*. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1997. Surat Edaran BI 30/2/UPPB tanggal 30/4/1997 Junto SE No. 30/UPPB tanggal 19/03/1998 tentang *Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum*. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1998. UU No. 10 tahun 1998, *tentang perubahan terhadap UU No. 7 tahun 1992*, Jakarta.
- Baridwan, Zaki. 2004. *Intermediate Accounting*. Edisi Ke 8. BPFE. Yogyakarta.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2009. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Hanafi, Mamduh dan Abdul Halim. 2005. *Analisis Laporan Keuangan*. Penerbit UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu. 2009. *Dasar-dasar Perbankan*. Cetakan ke-11. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- [http:// www.bankmuamalat.co.id](http://www.bankmuamalat.co.id) / tentang / visi – dan - misi. Dinduh Pda Tanggal 26 Oktober 2014.
- [http:// saosabcd.blogspot.com](http://saosabcd.blogspot.com) / 2013 / 04 / sejarah – awal – berdirinya – bank - muamalat. Diunduh Pada Tanggal 26 Oktober 2014.
- [http:// www.syariahmandiri.co.id](http://www.syariahmandiri.co.id) / category / info – perusahaan / profil – perusahaan / sejarah. Diunduh Pada Tanggal 26 Oktober 2014.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2004. *Standar Akutansi Keuangan*. Salemba Empat, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI, Jakarta.
- Kasmir. 2002. *Manajemen Perbankan*. Edisi 1, Cetakan ke-3. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*. Penerbit UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Munawir, S. 2007. *Analisa Laporan Keuangan*. Liberty. Yogyakarta.
- Saragih, Arie Firmansyah. 2011. *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Antara Bank Syariah Dengan Bank Konvensional*.
- Setyaningsih, Ari dan Sri Utami, Setyaningsih. 2013. *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan*

*Syariah Dengan Perbankan Konvensional.* Fak. Ekonomi Univ. Slamet Riyadi. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan* Vol. 13, No. 1, April. Surakarta.

Triandaru, Sigit dan Santoso, Totok Budi. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain.* Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

Yulianto. Agung. 2010. *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Konvensional Dengan Perbankan Syariah Sebelum Dan Saat Krisis Finansial Global Tahun 2006-2009.* Fak. Ekonomi, Univ. Negeri Semarang. Semarang.